

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan terkait strategi pemerintah dalam penertiban PKL di Gentala Arasy yang di analisis menggunakan teori strategi menurut Geoff Mulgan maka dapat disimpulkan bahwa,

1. Tujuan, strategi pemerintah Provinsi Jambi dalam penertiban PKL di kawasan Gentala Arasy telah mencakup langkah-langkah penting seperti sosialisasi atau pembinaan, relokasi, penertiban, dan pengawasan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan di kawasan wisata. Namun, pelaksanaan strategi tersebut belum berjalan secara optimal dan belum mampu memberikan solusi yang berkelanjutan dalam menyelesaikan permasalahan PKL secara menyeluruh.
2. Lingkungan, keberadaan PKL di area-area terlarang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan kawasan wisata, seperti terganggunya kenyamanan dan mobilitas wisatawan, penurunan estetika dan kebersihan, serta terganggunya fungsi ruang publik, selain itu aktivitas berdagang yang tidak tertata juga menciptakan ketidaktertiban di kawasan tersebut.
3. Pengarahan, strategi pengarahan telah dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi, pemberitahuan sebelum tindakan penertiban, serta menjalin koordinasi antarinstansi, baik secara resmi maupun internal. Meskipun prosedur ini cukup adil, tantangan tetap muncul akibat masih adanya PKL

yang tidak patuh atau bahkan melawan. Situasi ini menunjukkan bahwa pengarahan perlu diperkuat dengan strategi komunikasi yang lebih efektif serta pembinaan yang berkelanjutan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan secara damai.

4. Tindakan, Tindakan yang telah dilakukan mencakup penertiban langsung, pemasangan spanduk, serta pengawasan di lapangan. Sayangnya, karena lemahnya pengawasan membuat tindakan tersebut belum optimal. Penertiban yang dilakukan secara mendadak juga kerap menimbulkan konflik, terutama karena tidak diiringi dengan solusi jangka panjang seperti relokasi atau pemberdayaan yang adil bagi PKL.
5. Pembelajaran, pengalaman penertiban PKL di kawasan Gentala Arasy telah memberikan pelajaran penting bagi pemerintah, bahwa penertiban secara mendadak cenderung memicu konflik. Oleh karena itu, pendekatan yang kini dikedepankan adalah sosialisasi dan pemberian peringatan secara bertahap sebelum tindakan dilakukan. Selain itu, pemerintah juga menyadari pentingnya pengawasan rutin dan penyediaan tempat relokasi yang layak agar strategi penertiban menjadi lebih efektif dan dapat diterima oleh para PKL.
6. Tantangan dan hambatan, strategi dalam penertiban PKL di kawasan Gentala Arasy menghadapi berbagai tantangan, seperti masalah kepatuhan pedagang terhadap aturan, pengawasan dan relokasi yang tidak memadai, serta potensi konflik saat penertiban. Penertiban yang dilakukan secara mendadak juga sering menimbulkan konflik antara pedagang dan aparat.

Selain itu, aktivitas PKL di area terlarang mengganggu kenyamanan wisatawan, menurunkan estetika, serta mengganggu fungsi ruang publik.

Tanpa solusi yang adil seperti relokasi atau pemberdayaan, penertiban berisiko menimbulkan ketimpangan ekonomi di kalangan pedagang kecil.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa, Strategi penertiban PKL di Gentala Arasy telah mencakup berbagai upaya seperti sosialisasi, penertiban, relokasi, pengawasan dan pembinaan, namun pelaksanaannya belum optimal dan belum menghasilkan solusi yang berkelanjutan. Meskipun pemerintah mulai menerapkan pendekatan yang lebih humanis, tantangan seperti rendahnya kepatuhan PKL, lemahnya pengawasan, dan terbatasnya lokasi relokasi tetap menjadi hambatan utama dalam mencapai penertiban yang efektif.

4.2 Saran

1. Satpol PP Provinsi Jambi sebagai instansi yang bertugas dalam menjaga ketertiban umum mungkin bisa melakukan pengawasan rutin dan terjadwal, karena hal tersebut sangat penting untuk menjaga keberlanjutan hasil penertiban pada PKL di kawasan Gentala Arasy. Tanpa pengawasan yang konsisten, PKL cenderung kembali menempati area terlarang setelah penertiban dilakukan. Oleh karena itu, kehadiran petugas secara berkala, baik harian maupun mingguan, diperlukan untuk mencegah pelanggaran berulang dan membangun kedisiplinan di kalangan PKL, sehingga kawasan wisata dapat tetap tertib dan nyaman secara berkelanjutan.

2. Sebagai bagian dari pemerintah yang berada langsung di tingkat wilayah, pihak Kecamatan dan Kelurahan Pasar memiliki peran dalam mendata dan menangani proses relokasi PKL di kawasan Gentala Arasy. Tugas ini mencakup identifikasi jumlah PKL, jenis dagangan yang dijual, serta kebutuhan ruang usaha yang sesuai. Dengan mengetahui kondisi riil di lapangan, pihak kecamatan dan kelurahan dapat membantu mencari lokasi relokasi yang layak, cukup, dan sesuai dengan karakteristik pedagang. Pendekatan ini penting agar relokasi berjalan adil, tidak mematikan mata pencaharian PKL, dan mampu mencegah mereka kembali ke area terlarang, sehingga penertiban kawasan wisata Gentala Arasy dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.